

**STRATEGI POLITIK PAKUBUWANA VI MELAWAN KOLONIAL
BELANDA TAHUN 1823 – 1830**

Oleh:

Sukrismiyati¹,

Tri Yuniyanto, Djono²

ABSTRACT

The purpose of this research are to know: (1) Political conditions in Surakarta palace before and during the reign of Pakubuwana VI, (2) Political strategy of Pakubuwana VI against Dutch colonial, (3) End of the match of Pakubuwana VI against Dutch colonial, (4) Implications of political strategy Pakubuwana VI in education

This research uses historical method. The steps taken by the historical method there are four stages of activities: heuristic, criticism, interpretation and historiography. Data sources uses are written sources which archives, books, magazines and newspapers. Data collection techniques used is the technique literature. Analysis of the data used is the analysis of historical analysis that prioritizes sharpness in interpreting the facts of history.

Based on the research done, it can be concluded that: (1) Political conditions in Surakarta palace was heavily influenced by the Dutch colonial. The Netherlands also apply political divide et empera that aims to disrupt the stability of Surakarta palace. Relationship between Surakarta palace with colonial government created in the form of agreements. One of the important agreement is an agreement in 1749 that the contents of the devolution of authority to the VOC. (2) Conflict between Pakubuwana VI with the Dutch colonial government is due to the agreements made by the predecessor. Among them was an agreement in 1677, 1705, and 1749. All agreements are detrimental to the palace of Surakarta and limiting power Pakubuwana VI. (3) In the Java War Pakubuwana VI assist Prince Diponegoro. On the one hand Pakubuwana required to provide assistance to the Netherlands because of the bond agreement. For the Pakubuwana VI Prince Diponegoro recommend a relief to quietly. Some of the strategies used include Mimis Kencana tactics, tactics Candrodimuko, secret meetings and Guerrilla War. (4) At the end of the War of Javanese prince Diponegoro was arrested and exiled by the Dutch to Manado, and

¹ Mahasiswa Program Pendidikan Sejarah FKIP UNS.

² Dosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS.

Pakubuwana VI exiled to Ambon on 8 July 1830. Pakubuwana VI died on July 5, 1849. (5) Implications of political strategy Pakubuwana VI in education, that can be used as literature in political education. Due to the political education not only include material about politics but also economics and history.

Keywords : *Pakubuwana VI, Political Strategy.*

PENDAHULUAN

Menjelang akhir abad ke-18, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Sistem kolonialisme yang berwujud persekutuan dagang atau yang dikenal dengan nama VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) resmi dibubarkan dan pemerintahan kolonial di Indonesia resmi diambil alih Pemerintah Belanda. Akan tetapi sistem eksploitasi dan monopoli tetap dipertahankan sewaktu pemerintah Belanda mengambil alih administrasi VOC. Sampai pertengahan abad ke-19 imperialisme Belanda memang masih menganggap perdagangan sebagai kepentingan fundamental, sedangkan kepentingan militer dan politik dianggap kurang esensial (Kartodirdjo, 1993).

Kebijakan yang diterapkan pihak kolonial sejak masih dipegang oleh VOC maupun ketika sudah diambil alih oleh pemerintah Belanda seringkali menimbulkan rasa tidak suka dan perlawanan diberbagai daerah. Perlawanan terhadap kolonialisme di Jawa yang tersohor diantaranya adalah perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Kerajaan Mataram mempunyai wilayah kekuasaan luas yang menjadi salah satu potensi besar yang akan mengancam keamanan Batavia (Ricklefs, 2008). Pasca berakhirnya perlawanan Sultan Agung, Belanda mulai melakukan pendekatan dengan pihak Kerajaan Mataram.

Setelah VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tahun 1799, semua kekayaannya diambil alih oleh pihak kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional kompeni dengan tujuan

untuk mendapatkan penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan, semuanya demi keuntungan kerajaan Belanda. Sedangkan pada bagian kedua abad ke-19 merupakan suatu periode baru bagi imperialisme Belanda yang ditandai oleh politik kolonial yang berbeda sekali dengan politik kolonial yang telah dijalankan sebelumnya. Kepentingan-kepentingan Belanda semula terbatas pada perdagangan, maka pada periode ini Belanda mulai mengutamakan kepentingan politik (Kartodirdjo, 1993).

Tahun 1808 telah berlangsung zaman baru dalam hubungan antara Eropa dengan Jawa. Pada tahun tersebut Marsekal Herman Willem Daendels dikirim oleh Louis Bonaparte untuk menjadi Gubernur Jenderal di Batavia. Yang memerintah selama tiga tahun terhitung mulai tahun 1808 sampai dengan tahun 1811 dengan tugas utamanya yaitu memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudera Pasifik (Ricklefs, 2008). Kebijakan Daendels yang baru salah satunya adalah memperlakukan penguasa Jawa Tengah seolah-olah mereka adalah vasal-vasal Batavia. Daendels menganggap bahwa para penguasa Jawa bukanlah pemimpin atau penguasa, akan tetapi sebagai seorang pegawai administrasi Eropa. Hal ini dianggap merupakan pelanggaran secara langsung terhadap hubungan yang telah dijalin sejak tahun 1750-an. Dari hal inilah awal mula konflik yang berkepanjangan yang puncaknya ditandai dengan meletusnya Perang Jawa.

Perang Diponegoro atau dikenal dengan sebutan Perang Jawa (Inggris: *The Java War*, Belanda: *De Java Oorlog*), adalah perang besar dan menyeluruh berlangsung selama lima tahun (1825-1830) yang terjadi di Jawa, antara pasukan penjajah Belanda di bawah pimpinan Jendral De Kock melawan penduduk pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya dengan berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Siasat perang yang dijalankan oleh pasukan Pangeran Diponegoro ternyata menyulitkan Belanda untuk menumpas pemberontakan tersebut. Maka pada tahun

1827 Jenderal De Kock menerapkan siasat perang baru yang dikenal dengan nama *Benteng Stelsell* atau siasat Benteng (Kartodirdjo, 1999). Belanda menggunakan siasat licik dengan berpura-pura mengajak berunding Pangeran Diponegoro yang kemudian ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tanggal 3 Mei 1830. Maka dengan itu maka Perang Jawa telah berakhir.

Perpaduan antara motif agama dan sosial ekonomi ini menyebabkan Perang Diponegoro menjadi perang yang sangat menyita keuangan pemerintah kolonial bahkan hampir membangkrutkan Belanda. Korban perang Diponegoro dari pihak Belanda sekitar 15.000 orang (8.000 orang Eropa dan 7.000 orang pribumi). Biaya perang 20 juta gulden. Sedangkan dari pihak Pangeran Diponegoro kurang lebih 200.000 orang. Padahal total penduduk Hindia Belanda waktu itu baru tujuh juta orang, sementara separuh penduduk Yogyakarta terbunuh (Ricklefs, 2008).

Bertepatan dengan meletusnya perang Jawa, di Surakarta berlangsung masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana VI yang telah dimulai dari tahun 1823. Adanya campur tangan yang besar dari pihak kolonial Belanda dalam urusan pemerintahan menimbulkan perasaan tidak senang dalam diri Pakubuwana VI. Konflik yang terjadi antara Pakubuwana VI dengan pihak Kolonial Belanda sudah dimulai sejak Pakubuwana VI naik tahta, dimana Susuhunan sudah menyanggah gelar *Sovereign* (Yang Berdaulat) akan tetapi masih harus menjalankan kewajiban kepada Belanda (Yosodipuro, 1980). Seharusnya dengan gelar *Sovereign* tersebut, Pakubuwana VI sudah bisa lepas dari Belanda dan menjalankan pemerintahannya sendiri secara penuh, selain itu juga tidak mendapatkan sebutan *colony* (terjajah) yang artinya mempunyai kekuasaan untuk mengatur segalanya sendiri (Djatikusumo, 1971).

Ketika berlangsung perang Jawa (1825-1830), Pakubuwana VI memilih untuk mendukung Pangeran Diponegoro. Akan tetapi dukungan perlawanan tersebut diberikan secara diam-diam. Dengan menerapkan

taktik perang Pakubuwana VI, pasukan Pangeran Diponegoro menyebabkan ketakutan dipihak Belanda. Tidak mengherankan jika pada tahun-tahun pertama perang, Belanda mengalami kekalahan.

Karena Surakarta masih terikat perjanjian dengan pihak Belanda diantaranya adalah perjanjian yang dibuat tahun 1677, tahun 1705, dan tahun 1749, maka Keraton Surakarta diwajibkan memberikan bantuan prajurit kepada Belanda. Hal ini mendorong Pakubuwana VI menerapkan strategi ganda, dimana disatu pihak Pakubuwana mengirimkan bantuan prajurit untuk berperang melawan Pangeran Diponegoro sedangkan disatu pihak lainnya secara diam-diam mengirimkan bantuan kepada Pangeran Diponegoro. Dalam perjuangannya Pakubuwana VI selalu berjalan seiring dengan Pangeran Diponegoro tetapi masing-masing mempunyai alasan sendiri-sendiri dalam melawan penjajah (Radjiman, 1984).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan sebagai sarana untuk pengumpulan data sumber primer dan sekunder. Adapun sumber- sumber tersebut diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Sasana Pustaka Keraton Kasunanan Surakarta, Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran Surakarta, dan Radya Pustaka Surakarta. Waktu yang digunakan peneliti adalah sejak penelitian disetujui pada bulan Februari 2013 hingga terselesaikannya penelitian ini yakni bulan Juli 2014 terhitung sejak penyusunan judul, penyusunan proposal, mengurus perijinan hingga pengumpulan data dan penulisan akhir. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian Historis, dimana dalam prosedur penyusunannya melalui empat tahap yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian yaitu; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis yang meliputi manuskrip, buku-buku, majalah dan Koran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Analisa data yang digunakan adalah analisa historis yaitu analisa yang menggunakan ketajaman dalam menginterpretasi fakta sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedaaan Politik Sebelum Pemerintahan Pakubuwana VI

VOC mengakui Pangeran Puger sebagai Susuhunan Pakubuwana I (1704-1719) pada Juni 1704, dan meletuslah Perang Suksesi Jawa I (1704-1708). Hal tersebut segera terbukti bahwa daerah-daerah pesisir yang tadinya diklaim Pakubuwana I sebagai pendukungnya hanya memberikan sedikit perhatian pada dirinya. Perlawanan utama wilayah pesisir berasal dari Demak yang berhasil ditaklukkan pada Oktober dan November 1704 (Ricklefs, 2008). Pakubuwana I memasuki Kartasura pada bulan September 1705, tanpa mendapat perlawanan dan menduduki singgasana yang menyebabkan Amangkurat III harus meninggalkan Surakarta.

Pakubuwana I dan VOC mencapai kesepakatan baru pada bulan Oktober 1705. Pihak VOC akan menghapus semua hutang dinasti tersebut sebelum tahun 1705, sebagai imbalan atas konsesi-konsesi besar yang telah dilakukan Pakubuwana I kepada VOC. Isi dari kesepakatan tersebut antara lain : (1) Pengakuan ulang atas batas-batas Batavia termasuk Priangan, (2) Penegasan ulang mengenai daerah-daerah yang menjadi kekuasaan VOC seperti Cirebon, Madura bagian Timur, dan Semarang, (3) Hak bagi VOC untuk mendirikan benteng-benteng, (4) hak untuk memonopoli beras, impor candu dan tekstil dll,.

Masa pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749), pada awal masa pemerintahannya dikuasai oleh ibunya yaitu Ratu Amangkurat, Patih Danurejo, dan nenek suri yang sangat berpengaruh yaitu Ratu Pakubuwana yang juga seorang sufi saleh. Pakubuwana II menjunjung

tinggi nilai-nilai religious dan supranatural yang menyebabkan Pakubuwana II berkeinginan untuk mempromosikan nilai-nilai islam (Ricklefs, 1998). Pada awal tahun 1742 muncul pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina dan Jawa yang dipimpin oleh Raden Mas Gerendi (Sunan Kuning). Peristiwa tersebut dikenal dengan nama *Geger Pecinan* yang menyebabkan Pakubuwana II terdesak dan melarikan diri ke Ponorogo. Pakubuwana II meminta bantuan kepada VOC dengan imbalan berupa daerah pesisir serta berhak dalam penentuan Patih. Keraton baru didirikan di Surakarta yang selesai di bangun pada tahun 1745 dan kepindahan resminya dilakukan pada Februari 1746. Pada masa pemerintahannya juga muncul konflik antara Pakubuwana II dengan adiknya yaitu Pangeran Mangkubumi yang kelak bergelar Hamengkubuwana I. Kejatuhan terbesar yang dialami selama masa pemerintahan Pakubuwana II adalah ditandatanganinya Perjanjian 1749 yang isinya menyatakan bahwa Pakubuwana II menyerahkan kekuasaan atas kerajaannya kepada VOC dan bagi penerusnya yang menjadi raja bukan dikarenakan warisan keturunan tetapi atas pinjaman dari VOC.

Tanggal 15 Desember 1749, Van Hohendorff mengumumkan pengangkatan putera mahkota Pakubuwana III (1749-1788). Tetapi beberapa hari sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Desember 1749, Pangeran Mangkubumi telah dinyatakan sebagai raja oleh para pengikutnya di markas besar mereka yaitu Yogyakarta. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi semakin gencar dan pihak VOC yang dibantu oleh Patih Pringgoloyo mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan tersebut (Darban, 2010). Pada masa pemerintahan Pakubuwana tersebut akhirnya ditandatangani perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang menandai dipecahnya Kerajaan Mataram dengan diakuinya Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa sebagian Jawa Tengah dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I.

Pengganti Pakubuwana III adalah Pakubuwana IV (1788-1820). Pakubuwana IV mulai mengangkat suatu kelompok baru yang

disenangnya pada jabatan-jabatan yang tinggi. Orang-orang tersebut menganut ide-ide keagamaan yang ditentang oleh hirarki keagamaan yang sudah mapan di Surakarta (Ricklefs, 2008). Pada November 1790, musuh-musuh Pakubuwana IV mengepung keraton Surakarta. Pasukan dari Mangkunegara I, Hamengkubuwana I, serta pasukan VOC mengambil posisi di sekitar Surakarta. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama "Geger Pakepung".

Pada masa pemerintahan Pakubuwana IV terjadi perubahan kekuasaan di Jawa dimana Herman Willem Daendels ditunjuk oleh Napoleon Bonaparte untuk menjadi Gubernur Jenderal Belanda dengan tugas utama mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daendels menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang dianggap merendahkan kedudukan penguasa Jawa yang berakibat pada konflik berkepanjangan yang berujung pada meletusnya Perang Jawa. Ketika Jawa jatuh pada kekuasaan Inggris, terjadi Perang Sepoy dimana Pakubuwana IV dan Hamengkubuwana II terlibat di dalamnya. Atas keterlibatannya tersebut daerah kekuasaan Pakubuwana IV semakin berkurang dan Hamengkubuwana mendapat hukuman pembuangan ke Penang.

Setelah Pakubuwana IV turun tahta, digantikan oleh Raden Mas Sugandi dengan gelar Pakubuwana V. Masa pemerintahan yang dijalankannya hanya singkat yaitu dari 1820-1823. Setelahnya digantikan oleh puteranya yaitu Raden Mas Sapardan dengan gelar Pakubuwana VI.

Keadaan Politik Masa Pemerintahan Pakubuwana VI

Susuhunan Pakubuwana VI adalah putera kesebelas dari Susuhunan Pakubuwana V. Pakubuwana VI dilahirkan pada hari Akhad Wage, 18 Sapar tahun Je 1734 atau tanggal 26 April 1807. Ibunya Raden Ayu Sosrokusumo adalah seorang selir. Karena itu Raden Mas Sapardan, nama kecil Pakubuwana VI tidak berhak menduduki tahta kerajaan Surakarta. Susuhunan Pakubuwana VI naik tahta pada hari Senin Kliwon, 9 Sura tahun Dal 1751 atau 15 September 1823 (Widodo, 1988). Yang

memegang jabatan sebagai patih adalah Kanjeng Raden Arya Sosrodingrat II yang semula adalah pengasuhnya sekaligus paman Pakubuwana VI sendiri. Selain itu juga dibantu oleh Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi (Putera Pakubuwana III), Kanjeng Gusti Pangeran Hadinagoro, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Buminoto dan Kanjeng Gusti Pangeran Kusumoyudo (Suyanto, 1984).

Konflik Susuhunan Pakubuwana VI dengan pemerintah kolonial Belanda sudah dimulai ketika pengangkatannya naik tahta. Penyebabnya adalah karena ketika naik tahta Pakubuwana VI mendapat sebutan *Sovereign*, tetapi masih mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan prajurit kepada pemerintah kolonial sesuai dengan isi perjanjian tahun 1677, tahun 1705 dan tahun 1749 (Yosodipuro, 1980). Padahal dengan gelar *Sovereign* seharusnya sudah bisa lepas dari segala perjanjian yang tidak dikehendaki. Penyebab lain disamping karena ikatan perjanjian, konflik juga terjadi karena Susuhunan Pakubuwana VI tidak ingin Surakarta pada khususnya dan tanah Jawa pada umumnya mengalami kehancuran, karena pada saat itu di Kasultanan Yogyakarta terdapat isu yang mengabarkan bahwa berpulangnya Hamengkubuwana IV disebabkan oleh ulah Pangeran Diponegoro, karena ambisinya untuk menjadi raja. Berita tersebut tentu mengejutkan, tetapi Pakubuwana VI percaya bahwa berita tersebut adalah ulah Belanda yang ingin mengacaukan situasi kerajaan.

Pangeran Diponegoro menghubungi Pakubuwana VI karena adanya keyakinan bahwa Pakubuwana VI mempunyai sikap yang sama dengan dirinya yaitu anti penjajahan. Adanya faktor-faktor persamaan yang membuat kedua Pangeran untuk saling menghormati, dan saling membantu untuk mengusir penjajah. Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh Susuhunan Pakubuwana VI dari Surakarta melakukan perlawanan yang sangat hebat kepada Belanda.

Strategi Politik Pakubuwana VI Menghadapi Pemerintahan Kolonial Belanda

Dari hal-hal yang menyebabkan konflik Pakubuwana VI dengan Belanda tersebut melahirkan tekad untuk segera melenyapkan penjajah seperti yang telah dirintis oleh eyangnya yaitu Pakubuwana IV. Sebelumnya Pakubuwana VI telah menggariskan tujuan politik yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Berusaha agar jangan sampai negeri dalem Surakarta Hidiningrat terpecah belah, (2) Berusaha agar jangan sampai wilayah negeri dalem Surakarta Hidiningrat bertambah sempit akibat terlalu sering dirongrong oleh pemerintah colonial, (3) Memandang perlu mengurungkan perjanjian tahun 1677, tahun 1705 dan tahun 1749, (4) Menginginkan kembali bersatunya negeri Mataram, (5) Melenyapkan Belanda dari tanah Jawa (Djatikusumo, 1971).

Dalam Perjuangannya, Pakubuwana VI selalu berjalan beriringan dengan Pangeran Diponegoro, tetapi masing-masing mempunyai alasan sendiri-sendiri dalam menghadapi penjajah (Radjiman, 1984). Keduanya saling bantu-membantu walaupun mempunyai tujuan masing-masing. Disamping itu dalam perjuangan keduanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, keduanya sepakat untuk mentaati perjanjian yang telah ditetapkan. Isi dari perundingannya antara lain :

- a. Ingkang Sinuhun Pakubuwana VI jika memberikan bantuan kepada Pangeran Diponegoro tidak perlu dilakukan secara terang-terangan dalam artian dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi
- b. Ingkang Sinuhun Pakubuwana VI memberikan bantuan kepada Pangeran Diponegoro baik dalam wujud makanan maupun harta
- c. Susuhunan Pakubuwana VI tetap memberikan bantuan kepada Belanda sesuai dengan perjanjian tahun 1749, hal ini dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengetahui rencana maupun gerak-gerik Belanda, disamping itu juga memudahkan kewajiban para mata-mata atau telik sandi

- d. Karena musuh mempunyai peralatan yang lebih modern, maka peperangan melawan Belanda dilakukan dengan jalan perang gerilya
- e. Jika dalam perkembangannya terjadi perubahan dalam hal politik maupun militer, maka perlu dilakukan pertemuan dan perundingan lagi (Yosodipuro, 1980).

Untuk memperjuangkan tujuan politik yang telah digariskan tentunya membutuhkan taktik dalam pelaksanaannya sehingga apa yang dilakukan tidak akan tercium oleh pihak musuh. Dalam menjalankan siasat yang telah ditetapkan bersama, dijalankan sandi yang hanya diketahui oleh pihak Pakubuwana VI dan Pangeran Diponegoro. Beberapa siasat yang dilakukan oleh Pakubuwana VI dan Pangeran Diponegoro antara lain sebagai berikut :

1. **Siasat *Mimis Kencana***, adalah antara kedua belah pihak yaitu baik pihak Pakubuwana VI maupun pihak Pangeran Diponegoro terjadi perang, keduanya berhadapan dengan membawa pasukan masing-masing. Siasat ini dilakukan dengan tujuan mengelabui Belanda agar pihak Belanda tidak mencurigai kedua belah pihak dan beranggapan bahwa keduanya saling bermusuhan dan berebut kekuasaan. Dengan kata lain siasat *mimis kencana* adalah berpura-bura perang yang tujuan sebenarnya adalah memberikan bantuan biaya kepada Pangeran Diponegoro (Suyanto, 1984).
2. **Siasat *Condrodimuko***, kata tersebut sebenarnya berasal dari cerita wayang dimana *Condrodimuko* adalah tempat penggodogan Gatutkaca untuk mencapai kesaktiannya. Pakubuwana VI menamakan sandi *Condrodimuko* kemungkinan besar alasannya adalah kerana gerakan yang dilakukan itu membicarakan tentang jalannya perang melawan Belanda, jadi identik dengan cerita wayang dimana membiicarakan siasat atau taktik yang akan dilakukan dalam berperang agar berjalan dengan sukses hampir sama artinya dengan mempersiapkan diri demi menuju tingkat kesaktian yang lebih tinggi

dalam cerita wayang. Tempat yang digunakan adalah lereng Gunung Merbabu (Djatikusumo, 1971).

3. **Pertemuan-pertemuan Rahasia**, pertemuan-pertemuan tersebut sering dilakukan baik di dalam lingkungan keraton maupun di luar keraton. Pertemuan yang dilakukan di luar keraton biasanya dilakukan oleh Pakubuwana VI dengan alasan bertapa untuk memohon dikaruniai anak laki-laki. Contoh-contoh dilakukannya pertemuan antara Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro antara lain adalah: (a) Pertemuan yang dilakukan di hutan Krendowahono. Menurut cerita Pakubuwana VI mengunjungi hutan Krendowahono untuk berburu diikuti oleh para keluarga, abdi dalem dan juga para pejabat dan prajurit Belanda. Sebenarnya Pakubuwana VI menuju desa kecil yang ada ditengah hutan untuk bertemu dan berunding dengan Kyai Mojo dan Sentot Alibasyah yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro, (b) Pada bulan November 1829, Pakubuwana VI melakukan pertemuan kembali dengan Pangeran Diponegoro di Dusun Jatinom, Klaten. Dalam pertemuan tersebut membahas serta memutuskan untuk melakukan perlawanan bersamaan yang bertujuan untuk meruntuhkan kekuasaan Belanda di Jawa Tengah, (c) pertemuan yang dilakukan di dalam lingkungan keraton dilakukan di suatu tempat yang disebut Panggung Sanggabuana. Panggung Sanggabuana adalah sebuah bangunan berbentuk segi delapan, dengan tinggi kurang lebih 30 meter dan bertingkat empat, tingkat teratasnya disebut dengan tutup saji. Fungsi utama dari Panggung Sanggabuana adalah untuk tempat sesaji, meditasi dan sebagai menara pengintai atau pemgamat daerah sekitar keraton (Djatikusumo, 1971).
4. **Perang Gerilya**, untuk Perang Gerilya dilakukan oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Strategi perang gerilya yang dilakukan yakni dengan cara berpencar, berpindah tempat lalu menyerang selagi musuh lengah. Setrategi ini sangat merepotkan tentara Belanda. Pada

tahun 1827 Jenderal De Kock menerapkan siasat perang baru yang dikenal dengan nama *Benteng Stelsell* atau siasat Benteng. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan jalan mendirikan pusat-pusat pertahanan berupa benteng-benteng di daerah-daerah yang telah dikuasai.

Akhir Perlawanan Pakubuwana VI Terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda

Menjelang akhir tahun 1829 Perang Diponegoro yang merupakan pemberontakan terhadap Belanda di pedesaan Jawa Tengah hampir berakhir. Sejumlah kecil pemimpin yang masih setia kepada Pangeran Diponegoro perlahan mundur ke gunung-gunung dimana mereka tetap bertahan hingga ditangkapnya Pangeran Diponegoro di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830 (Carey, 1981). Pihak Belanda yang memang sudah sangat ingin mencabut seluruh kekuasaan dari para pemimpin Jawa segera melakukan perundingan untuk menentukan status baru bagi kedua kerajaan Jawa. Perundingan antara Belanda, Surakarta, dan Yogyakarta dilaksanakan oleh komisar pemerintah yang terdiri dari tiga orang yang memang ditugaskan khusus untuk tujuan tersebut. Ketiga anggota komisar tersebut adalah P. Merkus, J.I. van Sevenhoven, dan H.G. Nahuys van Burgst.

Keadaan keraton Yogyakarta sangatlah menderita pada akhir Perang Jawa. Keraton dan banyak istana kepangeranan lainnya rusak, dan penduduk mengungsi secara besar-besaran. terjadi kekurangan pangan dimana-mana, dan diperparah dengan Hamnengkubuwono V yang masih kanak-kanak tersebut belum bisa menggunakan kewenangan pribadinya. Situasi berbeda terjadi Surakarta. Pada saat permulaan perang, Surakarta mengalami kekurangan pasokan pangan yang disebabkan oleh terputusnya hubungan dengan dunia luar, tetapi berhasil lolos dari kerusakan yang diakibatkan oleh perang. Surakarta yang pada

saat tersebut didawah kekuasaan Pakubuwana VI yang posisinya sebenarnya dipersengketakan . Sebagai putera dari seorang selir Pakubuwana V, pemilihannya sebagai raja pada tahun 1823 telah menimbulkan pertentangan keras (Houben, 2002).

Beberapa perundingan dilakukan antara pihak Belanda dengan Pakubuwana VI dengan tujuan untuk mencari jalan penyelesaian masalah. Perundingan resmi pertama dilakukan pada 12 Mei 1830. Dalam perundingan tersebut mengusulkan mengenai penyerahan daerah di sebelah Barat dan Timur Surakarta kepada Belanda dan sebagai imbalannya pajak atas daerah tersebut diserahkan kepada Surakarta. Selain itu Belanda juga meyakinkan akas terus membarikan dukunagan secara financial kepada para Pangeran dan menghapuskan seluruh kondisi yang mengakibatkan Perang Jawa. Pihak Pakubuwana VI mengajukan permintaan bahwa bagia tiap-tiap Bupati dari setiap daerah diizinkan untuk mengunjungi keraton setiap tahunnya untuk melakukan penghormatan kepada Sunan. Usulan dari Pakubuwana VI ditolak oleh pihak Belanda yang menimbulkan kekecewaan di pihak Kasunanan. Pada Tanggal 29 Mei 1830, Pakubuwana VI memberikan persetujuan atas usulan Belanda tersebut dengan syarat tetap mempertahankan tradisi penghormatan tahunan oleh Bupati mancanegara.

Kepuasan yang dirasakan oleh Belanda tidak berlansung lama. Pada tengah malam tanggal 5 Juni 1830 Pakubuwana VI dengan diam-diam meninggalkan keraton dengan 7 orang pengiringnya. Dari keraton Ia menuju Jatinom, Klaten, kemudian masuk hutan terus ke Mancingan Parangtritis, di tepi pantai samudera selatan. Nahuys yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan pengeledahan di keraton untuk memastikan bahwa Pakubuwana VI benar-benar meninggalkan keraton. Pada tanggal 8 Juni 1830 akhirnya Pakubuwana VI ditangkap di Mancingan oleh Residen Yogyakarta Van Nes dan Letnan Kolonel B. Sollewijn. Belanda memutuskan untuk mengasingkan Pakubuwana VI ke luar Jawa karena ditakutkan akan melakukan pemberontakan. Akhirnya

Pakubuwana VI dibuang ke Ambon pada tanggal 8 Juli 1830 (Houben, 2002).

Pada tanggal 14 Juni 1830 Pangeran Purbaya dinaikkan posisinya menjadi Pangeran Adipati Anom (putera mahkota), kemudian menjadi Susuhunan Pakubuwana VII. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan, raja baru diharuskan menandatangani perjanjian persekutuan. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa raja baru tersebut harus menjaga perdamaian Jawa dan didesak untuk menuruti dan menyetujui segala sesuatu yang dilakukan oleh komisaris dan residen. Pada tanggal 22 Juni 1830 Pakubuwana VII menandatangani perjanjian tersebut.

Pakubuwana VI wafat pada tanggal 5 Juli 1849 di pembuangan dan di makamkan di Ambon. Kerangka akubuwono VI dipindahkan ke Imogiri, Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 1957 dan mendapat kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia serta masyarakat pada umumnya (Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan, 1964). Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 294/64 tanggal 17 November 1964 Pakubuwana VI diangkat menjadi “ Pahlawan Kemerdekaan Nasional “.

Implikasi Dalam Pendidikan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan mengenai strategi politik yang diterapkan oleh Pakubuwana VI dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda, ada berbagai macam strategi yang dapat digunakan. Strategi politik yang diterapkan oleh Pakubuwana VI ada yang bersifat *cooperative* (bersedia melakukan kerjasama) ataupun yang bersifat langsung menentang. Berbagai macam strategi tersebut dapat digunakan atau di aplikasikan oleh masyarakat sekarang karena sifatnya fleksible atau luwes dan berkembang sesuai dengan perubahan keadaan situasi politik yang ada. Penjabaran mengenai strategi politik tersebut dapat didalami melalui pendidikan politik yang dilakukan melalui lembaga non formal (melalui keluarga) dan lembaga formal (melalui sekolah).

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun non formal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial (Muchtar, 2000).

Menurut Kartono (1990), pendidikan merupakan salah satu faktor sekaligus sebagai kekuatan politik. Pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di suatu Negara, begitu juga sebaliknya lembaga-lembaga dan proses politik suatu Negara akan berdampak besar pada karakteristik pendidikan yang ada pada Negara tersebut.

Menurut Plato, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Pendapat tersebut mendapat dukungan dari Denis Heater, yang menyatakan bahwa golongan orang dewasa seharusnya dapat membuat pilihan dan sudah siap untuk ambil bagian dalam beberapa kegiatan politik di dalam suatu sistem demokrasi yang representatif. Untuk itu, pendidikan politik harus diperkenalkan sejak dini agar mereka sudah sangat memahami prosedur politik yang benar pada saat dewasa nanti. Untuk mendapatkan hal tersebut, anak-anak bukan hanya harus diajarkan politik dan diberi keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi melainkan juga harus diperbolehkan untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Kesemuanya itu dapat dilakukan dalam lingkup lembaga kecil, salah satunya yaitu sekolah.

Melalui pendidikan seorang siswa akan paham secara tidak langsung mengenai seluk beluk politik. Begitu pula sebaliknya, bahwa

dunia politik adalah salah satu sarana untuk mengaplikasikan berbagai ilmu yang telah didapat siswa melalui dunia pendidikan. Para siswa tidak dapat acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar dunia sekolahnya. Bentuk pendidikan politik dapat diselenggarakan antara lain melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media)
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal (Kantaprawira, 2004).

Dari berbagai jalur pendidikan politik tersebut, jalur pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah dianggap menjadi sarana yang paling efektif sebagai tolak ukur keberhasilan. Pada pembelajaran formal di kelas melalui teori-teori yang diajarkan oleh guru dan praktek secara langsung ataupun secara tidak langsung. Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan yang lepas kendali agar memiliki pemahaman yang jelas terhadap arah tujuan bangsa.

Pokok-pokok materi pendidikan politik sepenuhnya tertuang sebagai muatan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan politik. Kurikulum merupakan salah satu faktor pendukung sosialisasi politik, di mana dalam kurikulum pendidikan politik terdapat dua tipe pengajaran yaitu pendidikan kewarganegaraan dan indoktrinasi politik. Kurikulum pendidikan politik sendiri merupakan jarak yang harus ditempuh oleh seorang siswa dalam mencapai target yaitu sadar politik yang ditandai dengan menguatnya daya nalar terhadap berbagai aktifitas politik dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik. Pemegang dan penyampai nilai-nilai serta pandangan-pandangan politik. Selain itu sebagai kreator dan manipulator budaya belajar, karena pada kenyataannya budaya

atau kebiasaan belajar anak di kelas secara tidak langsung akan menimbulkan akibat politik.

Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, seorang guru harus pula memasukan mata pelajaran lain yang sekiranya ada hubungannya dengan pendidikan politik seperti di atas disebutkan yaitu mata pelajaran sejarah dan ekonomi dalam artian bahwa mata pelajaran lain tersebut bersifat sebagai pelengkap (komplementer) terhadap pendidikan politik. Sehingga tidak hanya memasukkan unsur materi politik namun juga terdapat unsur etika, ketaatan pada hukum dan kekuasaan, pemahaman terhadap jalannya pemerintahan dan pembuatan kebijakan, serta masalah ekonomi dan sejarah. Bahan pendidikan politik di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai makna yang dipetik dari perjuangan bangsa Indonesia. Semua bahan ajar pendidikan politik tersebut telah tercakup dalam mata pelajaran PKn.

KESIMPULAN

Keadaan politik Kasunanan Surakarta sebelum masa pemerintahan Pakubuwana VI sebagian besar dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Siasat adu domba sering dijalankan oleh Belanda untuk mengganggu stabilitas kerajaan. Bentuk hubungan kerjasama antara Kasunanan Surakarta dengan kolonial Belanda antara lain dalam wujud ditandatanganinya perjanjian-perjanjian diantara kedua belah pihak. Sebagian besar perjanjian yang dibuat selalu lebih menguntungkan pihak Belanda dibandingkan pihak Kasunanan Surakarta. Sedangkan perjanjian yang sangat penting dan dianggap merampas kemerdekaan Mataram adalah perjanjian di tahun 1749. Perjanjian tersebut dibuat pada masa akhir pemerintahan Pakubuwana II. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan mengenai penyerahan kedaulatan terhadap VOC, sehingga untuk pemerintahan selanjutnya raja yang diangkat harus atas persetujuan VOC,

dan bagi raja yang berkuasa bukan dikarenakan atas dasar warisan tetapi atas dasar kemauan VOC.

Konflik yang terjadi antara Pakubuwana VI dengan Belanda muncul akibat adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para raja pendahulu Pakubuwana VI yang sangat merugikan pihak keraton. Seperti raja-raja sebelumnya, Pakubuwana VI terikat dengan perjanjian dengan Belanda antara lain perjanjian tahun 1677, tahun 1705, dan tahun 1749 yang membatasi kekuasaannya. Selain itu Belanda telah menyebarkan kabar bahwa meninggalnya Hamengkubuwana IV akibat dari ulah Pangeran Diponegoro. Kabar tersebut dimaksudkan untuk mengacaukan kerajaan, sehingga Pakubuwana VI memutuskan untuk bekerjasama dengan Pangeran Diponegoro dalam menghadapi Belanda.

Pakubuwana VI memberikan bantuan kepada pihak Pangeran Diponegoro secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dari pihak Belanda. Beberapa strategi yang digunakan antara lain adalah siasat mimis kencana (pihak Pakubuwana VI dan Pangeran Diponegoro masing-masing membawa pasukan dan berpura-pura perang) yang bertujuan agar pihak Belanda tidak mencurigai pihak Pakubuwana VI dan menganggap bahwa kedua belah pihak sedang perang untuk berebut kekuasaan. *Condrodimuko* merupakan nama sandi untuk siasat yang dipakai oleh Pakubuwana VI dalam mempersiapkan atau menyusun strategi atau taktik yang dipakai dalam perang, hal tersebut sesuai dengan cerita pewayangan dimana kawah *condrodimuko* adalah tempat Gatutkaca menempa kesaktiannya. Selain itu strategi lain yang sering dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan rahasia dengan Pangeran Diponegoro. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara lain dilakukan di hutan Krendowahono, di Guworojo (Iereng Merapi), di Dusun Jatinom Klaten, dan tidak jarang juga dilakukan dalam lingkungan keraton. Semua strategi yang disusun oleh Pakubuwana VI berhasil membantu Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda.

Menjelang akhir tahun 1829 Perang Diponegoro yang merupakan pemberontakan terhadap Belanda di pedesaan Jawa Tengah hampir berakhir. Sejumlah kecil pemimpin yang masih setia kepada Pangeran Diponegoro perlahan mundur ke gunung-gunung dimana mereka tetap bertahan hingga ditangkapnya Pangeran Diponegoro di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Pada tengah malam tanggal 5 Juni 1830 Pakubuwana VI dengan diam-diam meninggalkan keraton dengan 7 orang pengiringnya. Dari keraton Ia menuju Jatinom, Klaten, kemudian masuk hutan terus ke Mancingan Parangtritis. Pada tanggal 8 Juni 1830 akhirnya Pakubuwana VI ditangkap oleh Residen Yogyakarta Van Nes dan Letnan Kolonel B. Sollewijn dan dibuang ke Ambon pada tanggal 8 Juli 1830. Sebagai gantinya Pangeran Purbaya diangkat menjadi raja dengan gelar Pakubuwana VII. Pakubuwana VI wafat pada tanggal 5 Juli 1849 di pembuangan dan di makamkan di Ambon. Kerangka Pakubuwono VI dipindahkan ke Imogiri, Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 1957. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 294/64 tanggal 17 November 1964 Pakubuwana VI diangkat menjadi “ Pahlawan Kemerdekaan Nasional “.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, Suwarna. 2000. *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Gelar Pustaka Mandiri
- Darban, A. Adaby. 2010. 254 Tahun Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755-13 Februari 2009. *Jurnal Ulama Tahun III*, 3 (1), 69-75
- Djatikusumo. 1971. *Sejarah Politik Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana VI*. Surakarta : Panitya Khol Dalem
- Houben, V.J.H. 2002. *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta*. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar* Bandung: Sinar Baru Algensindo

- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta : Gramedia
- Kartono, Kartini. 1990. *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju
- Purwadi. 2007. *Sejarah Raja-Raja Jawa*. Yogyakarta : Media Abadi
- Radjiman. 1984. *Sejarah Mataram Kartasura Sampai Surakarta Hadiningrat*. Surakarta : Toko Buku Rodra
- Ricklefs, M.C. 1998. *The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II*. St Leonards NSW : Asian Studies Association of Australia in Association with Allen & Unwin
- _____. 2002. *Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*. Yogyakarta: Mata Bangsa
- _____. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan. 1964. *Riwayat Singkat Perjuangan Sri Susuhunan Pakubuwana VI Almarhum Melawan Pemerintah Kolonial Belanda*. Jakarta
- Soekanto. 1952. *Sekitar Jogjakarta 1755-1825: Perjanjian Gianti-Perang Diponegoro*. Jakarta dan Amsterdam : Mahabarata
- Suyanto, Sunar Tri. 1984. *Pahlawan Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia Sinuhun Banguntapa*. Surakarta : Tiga Serangkai
- Yosodipuro. 1980. *Sejarah Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana VI Pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia*. Surakarta : Sasana Pustaka.